



1 Irak dan Suriah Sebelum Kemunculan ISIS

Dedy Wardhana Lubis

E-mail: dedywardhanalubis@yahoo.co.id

Yasinta Dewi

E-mail: yasinta1812@gmail.com

Kehidupan tidak pernah luput dari konflik dan perselisihan. Adanya kedamaian tidak lantas membuat konflik dan perselisihan sirna begitu saja dari kehidupan manusia. Bahkan terkadang, untuk memperoleh kehidupan yang damai harus melalui berbagai konflik terlebih dahulu. Namun hal yang paling penting adalah mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa demi kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Konflik, perang, perselisihan, dan situasi kehidupan yang tidak lagi dipenuhi kondisi damai sudah bukan lagi menjadi ‘peristiwa langka’ dalam kehidupan manusia. Konflik telah ada sejak sejarah kehidupan manusia pertama dimulai, yakni ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Konflik adalah suatu kenyataan hidup yang tidak bisa dihindari dan akan selalu menyertai kehidupan manusia di muka bumi. Konflik sering terjadi di saat masyarakat yang terdiri dari beranekaragam budaya dan corak, memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda pula. Masyarakat memiliki pandangan berbeda tentang hidup dan masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Ketika sasaran dan kepentingan yang ingin dicapai bertentangan, maka hal itu kerap memicu terjadinya konflik. Konflik dapat terjadi antar individu, kelompok, negara, bahkan antar negara (internasional).

Negara-negara di Timur Tengah sering terlibat konflik karena kawasan tersebut memiliki arti penting bagi negara-negara di seluruh dunia. Timur

Tengah memiliki lima arti penting: pertama, sebagai sebuah wilayah yang strategis; kedua, negara penghasil minyak; ketiga, tempat kelahiran agama-agama besar dunia; keempat, rawan konflik dan banyak interseksi identitas; dan kelima, memiliki kedekatan emosional dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, seperti Indonesia.¹ Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, mengungkapkan hampir 50 persen dari negara yang penduduknya mayoritas Muslim mengalami konflik.² Hal itu terjadi seperti di Pakistan, Afghanistan, Yaman, Mesir, Irak, Iran, Nigeria, Israel, dan Libya. Negara-negara yang sering terjadi konflik sering melakukan berbagai tindakan kriminal dengan melukai secara fisik seperti saling membunuh, mengebom, menyiksa, dan menghancurkan. Jika dicermati, konflik dan perang memang kebanyakan terjadi di kawasan Timur Tengah yang berpenduduk mayoritas Muslim. Beberapa pihak mengklaim bahwa fenomena ini adalah taktik dan cara Barat terutama Amerika Serikat untuk menghancurkan dan memecah-belah kesatuan umat Muslim yang ada di dunia. Namun hal ini tidak sepenuhnya bisa dibenarkan serta masih memerlukan verifikasi yang panjang dan akurat. Jusuf Kalla sebagai wakil presiden Indonesia merasa beruntung bahwa Indonesia sekalipun berpenduduk Muslim terbesar di dunia tidak sering terlibat konflik sebagaimana frekuensi konflik yang terjadi di Timur Tengah. Jusuf Kalla berpendapat hal tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia bisa hidup secara harmonis dengan saling menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan sikap toleransi, termasuk dalam hal perbedaan keyakinan (agama).

Menilik sejarah konflik di kawasan Timur Tengah tidak bisa terlepas dari masa lampau. Saat dimana Kesultanan Usmani mengalami kemunduran yang berujung pada keruntuhan dari kesultanan tersebut. Paska keruntuhan, Perancis dan Inggris membagi wilayah-wilayah di Timur Tengah berdasarkan keberhasilan mereka dalam menganeksasi dan menguasai sebuah wilayah sebagai jajahan. Pembagian tidak lagi mengikuti aturan yang seharusnya namun malah dibagi seenaknya oleh kedua negara anggota Dewan Keamanan PBB tersebut. Hal inilah yang meninggalkan “bom waktu” bagi gejolak dan kompleksitas keadaan Timur Tengah sekarang ini. Kondisi inilah yang menjadi awal kekacauan di Timur Tengah. Masing-masing negara sibuk dan gencar memperebutkan wilayah kekuasaan melalui metode kekerasan dan bersifat coercive seperti yang terjadi di Jalur Gaza antara Israel dan Palestina.

Salah satu negara di Timur Tengah yang sering dilanda konflik adalah Irak. Negara yang memiliki dua sungai bersejarah, yakni sungai Eufrat dan Tigris ini, menjadi perhatian dunia karena negaranya yang sering berkonflik. Sebut saja Perang Irak yang terjadi pada tahun 2003 dan fenomena kelahiran organisasi radikal besutan Al Qaeda, ISIS. Banyak pihak yang telah

mengancam keberadaan ISIS. Bahkan ancaman terhadap ISIS datang dari sepuluh negara Arab yang menyatakan dukungannya untuk memerangi serta mengutuk kekejaman ISIS, termasuk dukungan dari Israel dan Amerika Serikat.³ Pada Februari 2015 yang lalu, ISIS baru saja menghancurkan peninggalan sejarah Irak berusia 2.500 tahun. ISIS menghancurkan patung-patung kuno koleksi Museum Mosul di Kota Mosul, Irak dan benda-benda bersejarah lainnya yang telah berumur ribuan tahun. ISIS menyebut peninggalan kuno tersebut sebagai sebuah berhala sehingga perlu dihancurkan. Mosul, kota terbesar kedua di Irak jatuh ke tangan ISIS dalam sebuah serangan kilat pada Juni 2014 setelah pasukan Irak tak kuasa menahan serangan ISIS.⁴ Selain Mosul di Irak, ISIS juga menghancurkan beberapa situs utama yang sekaligus menjadi peninggalan kuno di Irak dan Suriah, diantaranya Khorsabad (Irak), Nimrud (Irak), Perpustakaan Mosul (Irak), Masjid dan Makam Kuno (Irak), Hatra (Irak), Dura Europos (Suriah), Mari (Suriah), Tel Ajaji dan Tel Brak (Suriah).⁵

Selain itu, akan dijabarkan juga mengenai keadaan negara Suriah sebelum adanya ISIS. Berkembangnya ISIS dimulai sejak terjadinya gejolak di Irak dan Suriah. Dari gejolak yang terjadi di antara kedua negara tersebut, perpecahan terjadi antara warga sipil di Irak maupun di Suriah. Sehingga dengan perpecahan tersebut, terbentuklah kelompok-kelompok militan dengan memiliki tujuan yang berbeda. Sasaran kelompok-kelompok militan tidak hanya ditujukan terhadap pemerintah, melainkan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Terkait konflik yang terjadi di Suriah, berkembangnya ISIS dapat ditinjau dari latar belakang sejarah dengan terbentuknya kelompok-kelompok yang menentang pemerintahan otoriter Hafez Al Assad dan Bashar Al Assad sehingga berimplikasi pada gejolak *Arab Spring* di Suriah. Terlebih lagi banyaknya intervensi asing dalam konflik Suriah membuat kelompok-kelompok militan semakin terpengaruh oleh propaganda untuk terus memberontak. Faktor-faktor tersebut membuat keadaan semakin runyam tatkala kelompok militan Irak turut campur sehingga terjadilah perpaduan antara kelompok-kelompok tersebut yang ingin menguasai wilayah Irak dan Suriah serta mendirikan sebuah negara Islam.

Setiap orang di muka bumi dibuat risau oleh ulah liar dan brutal yang dilakukan kelompok ISIS, tidak terkecuali rakyat Irak. Namun bagaimana keadaan Irak sebelum ISIS lahir di salah satu negara Timur Tengah tersebut jika ditinjau dari aspek politik-keamanan, ekonomi dan sosial-budaya negaranya? Topik inilah yang akan menjadi bahasan utama dalam tulisan berikut ini. Penulis akan membahas tentang salah satu tragedi penting di Irak yaitu Perang Irak yang merupakan invasi pasukan Amerika Serikat pada tahun

2003 dan telah memporak-porandakan Irak serta turut mengganggu keseimbangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Keadaan di Irak

Tidak dulu tidak sekarang, kawasan Timur Tengah tetap saja menjadi wilayah yang sarat konflik. Tampaknya Timur Tengah masih belum menemukan titik terang untuk mencapai situasi dan kondisi regional yang damai dan minim konflik. Negara-negara Timur Tengah malah sering terlibat konflik antar negara tetangga bahkan perang saudara. Hal ini tentunya tidak terlepas dari intervensi pihak asing. Sebagai contoh, invasi dari Amerika Serikat dan sekutunya ke Afghanistan pada tahun 2001 serta invasi Amerika Serikat dan sekutu ke Irak pada tahun 2003. Perang Irak telah mengganggu keseimbangan geopolitik di Timur Tengah dan keseimbangan politik dalam negeri Irak. Keseimbangan di Timur Tengah yang telah terbentuk lama dihancurkan oleh AS dan sayangnya AS malah tidak berhasil menciptakan keseimbangan yang baru. Keadaan yang terus bergejolak di kawasan Timur Tengah membuat kaum-kaum ekstrimis tumbuh menyebar bagaikan jamur di musim penghujan dan berusaha membentuk aliansi yang kuat yang berujung pada lahirnya 'monster-monster teroris'. Untuk melihat kondisi 'negeri 1001 malam' sebelum kemunculan ISIS, penulis akan meninjau dari tiga aspek, yakni; politik-keamanan, perekonomian dan sosial-budaya Irak, dengan rentang waktu antara tahun 2004 hingga 2013 atau pasca invasi Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003, pasca keruntuhan rezim Saddam Hussein dan sebelum kelahiran ISIS di tahun 2013.

Situasi dan Kondisi Negara Irak Sebelum Kemunculan ISIS (Aspek Politik-Keamanan, Ekonomi, dan Sosial-Budaya)

Dari segi politik-keamanan, pasca hengkangnya Amerika Serikat dari tanah Irak, kelompok Sunni mengkhawatirkan kelompok Syiah akan bertindak sewenang-wenang terhadap kelompoknya. Pasalnya, pasca kejatuhan rezim Saddam Hussein, kekuasaan beralih ke tangan kelompok Syiah. Saat Saddam Hussein berkuasa kelompok Sunni melakukan penindasan terhadap suku lain di Irak, termasuk Syiah. Keberadaan pasukan Amerika Serikat akan memicu dendam dan bentrokan antar kelompok suku. Perdana Menteri Irak terpilih, Nuri al-Maliki memperlakukan Syiah dan Sunni secara berbeda. Maliki yang pernah diasingkan selama 24 tahun pada saat pemerintahan Saddam disinyalir akan melakukan tindakan balas dendam dengan lebih kejam terhadap Sunni. Setelah penarikan pasukan Amerika, kondisi Irak menjadi tidak stabil. Iran tidak mengalami perubahan, bahkan kekejaman masih sering terjadi seperti

pembunuhan, kekerasan, pemberontakan sektarian, dan berbagai kehancuran lainnya.

Di bawah kepemimpinan Saddam Hussein, meskipun memimpin secara otoriter, pada kenyataannya ia dapat dikatakan lebih berhasil. Jika dibandingkan dengan keadaan setelah rezim Saddam Hussein, konflik antar etnis dan agama meletus dimana-mana yang bernuansa kekerasan. Sebagai contoh konflik antara kelompok Syiah dan Sunni serta Kurdi dimana ketiga kelompok berlomba untuk memperebutkan kursi kekuasaan di Irak. Irak dilanda kemelut politik dan kekerasan yang menewaskan ribuan orang sejak pasukan Amerika Serikat menyelesaikan penarikan dari negara itu pada 18 Desember 2011 dan meninggalkan tanggung jawab keamanan kepada pasukan Irak.⁶ Perdana Menteri Irak saat itu, Nuri al-Maliki yang berasal dari kelompok Syiah berupaya untuk menangkap Wakil Presiden Irak, Tareq al-Hashemi yang berasal dari kelompok Sunni. Hashemi diduga keras terkait dalam gerakan terorisme, pembunuhan dan serangan-serangan yang terjadi di Irak. Hal ini sudah barang tentu mendapatkan perlawanan dari pendukung Hashemi dengan turut mengadakan demonstrasi dan protes besar-besaran untuk mendukung Hashemi dan mengancam pemerintah.

Setelah hampir setahun mengalami kemandekan politik, Irak akhirnya memiliki pemerintahan baru, hasil dari pemungutan suara di parlemen pada Selasa, 21 Desember 2010.⁷ Pemerintahan yang dipimpin oleh Nuri al-Maliki ini masih memiliki beberapa posisi menteri yang masih kosong. Dalam pemilu tersebut, tiga kandidat yang berasal dari etnis Syiah, Sunni, dan Kurdi berhasil mendapatkan posisi dalam kursi pemerintahan Irak. Ketiga etnis mewakili keberagaman etnis yang ada di Irak. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kembali pertikaian antar etnis. Beberapa kursi menteri masih kosong seperti Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keamanan Nasional. Pemerintah Irak mengakui bahwa pihaknya harus benar-benar teliti dalam menyeleksi calon yang akan menduduki kursi-kursi kosong tersebut menyusul perselisihan yang masih ada di tubuh koalisi. Kesuksesan pemilu di Irak menunjukkan demokrasi mulai berkembang dan tumbuh subur di negara tersebut. Terpilihnya pemerintahan dengan diisi oleh berbagai etnis menunjukkan komitmen Irak untuk bersikap demokratis dalam menyikapi perbedaan dan bukti penolakan Irak terhadap gerakan ekstrimisme yang berusaha memecah belah etnis-etnis yang ada di Irak. Pemerintahan baru Irak memiliki tugas untuk mencegah terjadinya perpecahan sektarian yang kerap terjadi. Selain itu, prioritas utama Irak ke depan adalah mengendalikan kekerasan dan melindungi Irak dari ancaman pihak luar di bawah kepemimpinan Maliki yang telah menjadi Perdana Menteri Irak sejak Mei 2006.⁸ Apabila diambil hikmah berdasarkan lika-liku kehidupan politik di Irak,

pelajaran yang dapat diambil adalah suatu sistem politik tidak akan selalu cocok dengan setiap kondisi masyarakat di dunia ini. Kehendak seseorang atau sebuah negara tidak bisa dipaksakan untuk menerapkan sistem politik suatu negara kepada negara lain tanpa memahami kultur bangsa atau masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam bidang ekonomi, perekonomian Irak memang didominasi oleh sektor perminyakan yang mengalami penurunan di saat kekacauan melanda negara tersebut. Sektor perminyakan menyediakan lebih dari 90% pendapatan negara Irak.⁹ Namun di samping sektor perminyakan, Irak juga unggul di sektor pertanian. Beberapa hasil utama produk pertanian Irak adalah gandum, anggur, dan kurma yang diekspor ke berbagai negara yang menjadi mitra ekspor Irak. Pada saat Irak diguncang berbagai konflik dan kekacauan yang terjadi di dalam negara, berbagai bidang dan sendi-sendi kehidupan ikut terkena imbasnya, mulai dari bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial-budaya, tatanan hidup bermasyarakat yang sudah ada, semuanya mengubah Irak menjadi sebuah negara yang memiliki wajah dan jati diri yang baru. Bahkan Irak hampir berada di ujung kehancuran dikarenakan konflik berkepanjangan yang tidak kunjung usai di negara itu.

Saat Saddam Hussein turun tahta dari jabatan kepresidenannya, kelompok Syiah berganti menjadi pemegang kekuasaan. Kontrol negara yang selama ini berada di bawah kendali kelompok Sunni, ternyata melahirkan dendam di kalangan Syiah saat terjadinya pergantian kepemimpinan tersebut. Banyak warga Sunni yang kekurangan pangan dan bekerja sebagai petani serta hidup di bawah garis kemiskinan. Seorang analis kebijakan politik luar negeri asal Inggris, Lucy Fisher, memaparkan sebuah data yang menyebutkan 20-35 persen populasi penduduk Sunni Irak mengalami kesulitan ekonomi.¹⁰ Kondisi ini merupakan sebuah ironi yang terjadi di Negara Irak. Mengingat negara ini merupakan sebuah kawasan yang subur ditambah dengan kondisi fisik negara yang dialiri dua sungai besar, Eufrat dan Tigris. Saat terjadi perang antara kelompok Sunni dan Syiah pada tahun 2003, hal inilah yang menghancurkan 90 persen pertanian Irak.¹¹ Sebagai hasilnya, pada tahun 2004 dan enam tahun berikutnya, Irak dilanda krisis pangan. Meskipun berbagai usaha telah dilakukan untuk merestorasi ekonomi Irak pasca perang, berbagai pelanggaran dan kemerosotan ekonomi masih melanda negara Irak. Menurut laporan dari Food and Agriculture Organization (FAO) yang dikeluarkan pada tahun 2004, pertanian Irak sedang berada di pinggir kehancuran, dengan ancaman kelaparan terhadap 24,5 juta penduduk Irak.¹² Kondisi ekonomi inilah yang mendorong kelompok Sunni untuk memberikan dukungan terhadap ISIS. Kondisi ekonomi yang timpang antara kelompok Syiah dan Sunni membuat Sunni berpihak ke ISIS karena ISIS muncul sebagai pihak

yang bisa menawarkan peluang hidup yang lebih baik yang jauh dari kenyataan yang selama ini diderita oleh Sunni, ditindas dan haknya dirampas oleh kelompok Syiah. Apabila kelompok Sunni memilih untuk tidak bergabung dengan ISIS, maka mereka hanya dihadapkan pada dua pilihan yang tersisa: menderita atau menjadi pengangguran.

Namun, menurut Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, ekonomi Irak justru melesat pasca Saddam Hussein berhasil digulingkan dari kursi kepresidenan pada tahun 2003. Menurutnya, tingkat kematian anak turun drastis, pertumbuhan ekonomi sekitar 9 persen terjadi pada tahun 2012, dan pendapatan minyak tahunan Irak mencapai USD 100 miliar atau sekitar Rp 1.000 triliun.¹³ Blair memprediksi bahwa angka tersebut akan meningkat sebanyak tiga kali lipat pada tahun 2020.¹⁴ Beberapa perusahaan Inggris dan investor asing didesak oleh Blair untuk membuka peluang di Irak. Namun yang perlu diperhatikan adalah kondisi keamanan negara Irak yang masih terus terganggu karena adanya ketegangan politik. Blair juga menambahkan bahwa kemajuan yang diperoleh Irak pasca invasi 2003 merupakan sesuatu yang tidak perlu dibesar-besarkan namun penting juga untuk tidak mengabaikan.

Tatanan kehidupan sosial-budaya masyarakat Irak telah dihancurkan oleh konflik dan kekacauan berkepanjangan yang terjadi, baik saat invasi dari Amerika Serikat maupun pasca invasi, yang telah memberi dampak secara langsung bagi kehidupan sosial masyarakat di Irak. Berbagai fasilitas dan infrastruktur yang ada di perkotaan hancur, masyarakat menderita kekurangan bahan pangan, malnutrisi, menderita berbagai jenis penyakit, kegiatan belajar mengajar di kalangan pelajar menjadi terhambat, rumah-rumah warga hancur berantakan, dan perselisihan antar etnis dan aliran agama yang terus berlanjut dan terlampaui mengakar telah menjadi kendala utama Irak dalam menyusun kembali tatanan kehidupan sosial yang aman dan damai.

Wabah kelaparan dan kekurangan gizi telah menjadi pemandangan biasa selama PBB dan dunia internasional menjatuhkan sanksi embargo terhadap Irak dan pasca kepergian pasukan Amerika Serikat meninggalkan Irak. Sebanyak 6.000 warga Irak meninggal dikarenakan kekurangan gizi dan penyebaran berbagai jenis penyakit.¹⁵ Yang paling disayangkan adalah sebagian besar korban kelaparan ini adalah anak-anak yang masih berumur di bawah lima tahun. Dalam laporan yang disampaikan pada akhir tahun 2004 di Jenewa, Badan HAM PBB menyatakan, “Angka penderita malnutrisi di Irak di kalangan anak-anak di bawah lima tahun telah meningkat hampir dua kali lipat sejak invasi Amerika Serikat terhadap Irak – mendekati angka 8%.”¹⁶ Anak-anak di Irak tidak memiliki makanan yang cukup untuk dimakan dan

lebih dari seperempat total jumlah anak-anak disana kekurangan makan. Saat Saddam Hussein digulingkan, jumlah anak-anak yang menderita kelaparan hanya sekitar 4% dan angka ini terus naik hingga mencapai jumlah 8%. Konflik yang berkepanjangan telah menghalangi masyarakat Irak untuk bercocok tanam. Padahal 'negeri 1001 malam' ini merupakan tanah yang subur dengan disokong sumber air dari aliran sungai Tigris dan Eufrat. Seorang spesialis PBB yang mengkaji di bidang kelaparan penduduk, Jean Ziegler, menyatakan bahwa kasus kematian massal yang disebabkan oleh kelaparan merupakan bentuk dari pembunuhan. Oleh karena itu wabah kelaparan di Irak harus dilawan dan dimusnahkan.

Masalah sosial masyarakat Irak lainnya adalah mengenai penempatan warga Kristen Irak di Swedia. Warga Kristen Irak melarikan diri ke beberapa negara di Eropa, seperti Swedia, Inggris, Norwegia dan Denmark sebagai akibat dari kondisi negara yang tidak stabil. Swedia menerapkan kebijakan tersebut dikarenakan banyak pengungsi Irak yang tidak memiliki dokumen resmi suaka politik di Swedia. Mereka yang dideportasi ke Baghdad merupakan kelompok minoritas Kristen yang berasal dari Irak. Dari sekitar 80.000 pengungsi Irak di Swedia, sekitar 6.000 diantaranya adalah umat Kristen.¹⁷ Swedia menerapkan 'standar' pengungsi yang layak untuk diterima berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga pengungsi Irak yang dianggap ilegal akan dipulangkan (dideportasi) ke Baghdad. Para pengungsi yang melarikan diri telah melakukan berbagai cara agar tetap bisa bertahan hidup seperti bersembunyi di gereja, bersembunyi di bawah tanah, bekerja secara ilegal, dan hidup secara berpindah-pindah (nomaden). Namun penempatan ini justru mengundang rasa simpati dari PBB. Dikhawatirkan mereka yang dikembalikan ke Irak akan kembali terancam baik kebebasan maupun hak hidup mereka. Melihat kenyataan ini, akhirnya Swedia bisa melunak dengan memberikan izin bagi mereka yang memiliki dokumen dan surat legal suaka politik untuk tinggal secara permanen di Swedia. Sementara pengungsi Irak yang memasuki Swedia secara tidak sah dan tanpa dokumen resmi suaka politik akhirnya melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Yordania dan Suriah pasca dideportasi ke Baghdad.

Perang Irak: Skenario AS Mendapatkan 'Minyak Gratis'

Perang Irak secara resmi dimulai pada tanggal 19 Maret 2003 oleh pasukan Amerika Serikat di bawah rezim Presiden George Bush Jr. Sesaat setelah Washington menjatuhkan bomnya di Kota Baghdad, Bush berpidato pada pukul 10:16 malam waktu setempat dengan isi pidato sebagai berikut:

“Masyarakat Amerika Serikat dan sekutu kami tidak mau hidup di bawah tatanan hidup yang keluar dari aturan hukum internasional yang mengancam perdamaian dunia dengan adanya senjata pemusnah massal. Kami akan menghapuskan ancaman tersebut sekarang juga, dengan kekuatan militer kami, baik itu dengan mengerahkan Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, penjaga perbatasan di pantai, dan U.S. Navy SEALs yang kami miliki, sehingga kita tidak perlu lagi takut terhadap ancaman tersebut.”¹⁸

Pidato Presiden Bush tersebut mengindikasikan bahwa motif penyerangan Bush ke Irak karena Irak diyakini memiliki senjata pemusnah masal. Dengan kata lain, tujuan invasi Amerika Serikat ke Irak adalah melucuti senjata pemusnah masal yang dimiliki Irak.

Pada dasarnya, perang merupakan cara lain untuk meraih tujuan politik. Tujuan politik yang ingin dicapai Amerika adalah menggulingkan Saddam Hussein dari kursi presiden. Apapun caranya akan dilakukan Amerika Serikat demi tercapai tujuan politik tersebut. Amerika selalu mengatasnamakan HAM sebagai alasan untuk menyerang Irak dengan adanya kejahatan kemanusiaan terhadap Syiah dan Kurdi. Amerika juga sering mengkampanyekan bahwa Irak berpotensi menjadi ancaman regional karena konflik yang sering terjadi di negara tersebut. Dan terakhir barulah Amerika mengklaim Irak memiliki senjata pemusnah masal sebagai alasan untuk terus menerus menyerang Irak sampai Saddam berhasil diturunkan dari tahta kepresidenan.

Namun apakah fakta tersebut sepenuhnya benar? Fakta bahwa Irak memiliki senjata pemusnah masal? Tidak. Pemerintahan ‘busuk’ Bush adalah satu-satunya dalang di balik skenario tersebut. Tujuan licik Bush akhirnya terungkap setelah Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA, mengakui sendiri tentang adanya kesalahan analisis sebelum dilancarkannya invasi terhadap Irak. CIA mengaku tidak dapat membuktikan keberadaan senjata pemusnah masal yang diduga dimiliki oleh rezim diktator Saddam Hussein.¹⁹ Pengakuan tersebut terungkap dalam sebuah dokumen resmi berupa review yang dibuat oleh CIA pada tahun 2006, tiga tahun setelah invasi Irak. Analisis tidak menghabiskan waktu yang cukup untuk memeriksa dugaan terhadap Irak dan CIA mendapatkan tekanan hebat dari pemerintahan Bush untuk mendapatkan temuan yang dapat menjustifikasi dilakukannya invasi.²⁰

Amerika telah menghabiskan anggaran Perang Irak sekitar US\$ 1 triliun dan 4.485 tentaranya tewas dari total 170.000 tentara yang dikirimkan saat perang.²¹ George W. Bush yang berasal dari Partai Republik memang memiliki pandangan berbeda soal perang jika dibandingkan dengan pemimpin negara yang berasal dari Partai Demokrat seperti Barrack H. Obama. Partai Republik cenderung konservatif dan tidak liberal layaknya Demokrat yang memiliki

prinsip menolak adanya perang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam masa kepemimpinan politiknya, Bush selalu mendapat stempel politik dari parlemen yang dikuasai Partai Republik untuk memuaskan ambisi politiknya, terutama perang melawan terorisme dan lebih kejam lagi perang melawan Irak dan dunia Islam.²² Negara-negara di Timur Tengah berkembang dan tumbuh menjadi kuat justru dikarenakan situasi yang sulit dan keadaan kacau yang berujung pada pemberontakan (*insurgent*) hasil dari serangkaian tindakan Amerika Serikat dan sekutunya yang salah dalam menjalankan strategi dan implementasi kebijakan luar negerinya.

Jika memang alasan penyerangan Amerika ke Irak adalah senjata, lalu mengapa Korea Utara, Cina, India, Israel atau Pakistan dua negara di region Asia (non-Barat) yang jelas memiliki senjata pemusnah masal-nuklir, tidak menerima tekanan sekeras seperti yang diderita Irak? Terlepas dari adanya kepentingan nasional dan kelanjutan kebijakan negara dari para pendahulunya, Bush dinilai memiliki kepentingan bisnis pribadi, yaitu minyak.²³

Amerika Serikat menginginkan adanya stabilitas di kawasan Timur Tengah sebagai jaminan tidak adanya sesuatu yang mengganggu suplai minyak untuk dipasok ke negaranya. Namun selama Irak masih terus berkonflik, perdamaian di kawasan tidak akan pernah tercipta karena partisipasi dari salah satu negara penghasil minyak terbesar itu sangat diperlukan. Sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, Irak merupakan barang penting dalam perdagangan internasional. Menurut sebuah survei yang dikeluarkan oleh US Energy Information Administration pada tahun 2014, Irak memproduksi 3,3 juta barel minyak per hari yang membuat Irak menempati posisi ketujuh sebagai negara-negara yang berhasil memproduksi jutaan barel minyak per harinya.²⁴ Posisi pertama ditempati oleh Amerika Serikat (12,4 juta barel per hari), disusul oleh Arab Saudi (11,6 juta barel per hari), Rusia (10,6 juta barel per hari), Cina (4,4 juta barel per hari), Kanada (4,3 juta barel per hari), Iran (3,4 juta barel per hari), Irak, Uni Emirat Arab (3,2 juta barel per hari), Meksiko (2,8 juta barel per hari), Kuwait (2,8 juta barel per hari).²⁵

Stabilitas regional kawasan Teluk (Timur Tengah) merupakan tujuan fundamental bagi kebijakan politik luar negeri Amerika. Bahkan hal ini pernah disampaikan secara terang-terangan oleh mantan Menlu Amerika, William Perry, yang menyatakan bahwa tidak ada yang lebih penting di dunia ini bagi Amerika, selain kawasan Teluk. Sehingga apapun ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan Teluk, negara adidaya tersebut tidak akan tinggal diam membiarkan stabilitas terganggu. Perang Irak yang terjadi sejak tahun 2003 baru resmi diakhiri setelah delapan tahun, yakni pada Kamis, 15

Desember 2011, setelah Amerika menarik mundur pasukannya sehari sebelumnya pada Rabu, 14 Desember 2011.²⁶

Keadaan di Suriah

Suriah merupakan sebuah negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Timur Tengah. Negara ini menjadi jantung bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah karena memiliki andil yang besar dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian. Meskipun demikian, Suriah termasuk negara yang rentan akan gejolak politik. Perbedaan pendapat antara politikus, kelompok militer, dan kelompok minoritas menjadikan keadaan perpolitikan Suriah sering mengalami gejolak. Negara ini telah mengalami serangkaian kudeta militer dan pemerintahan rezim militer selama tiga dekade.²⁷ Kudeta militer telah dimulai pada masa pemerintahan kolonel Husni Zaim tahun 1949 dengan menggulingkan pemerintahan Presiden Shukri Al Quwwatli.²⁸ Saat pemerintahan sipil, munculnya berbagai partai salah satunya ialah Partai Ba'ath. Partai ini didirikan oleh Michael Aflaq dan Salahuddin Al Bittar dimana partai tersebut menjadi suatu gerakan sosialisme dan nasionalisme Arab.²⁹ Partai ini telah menjadi pusat perhatian warga Suriah sehingga banyak warga Suriah yang tertarik untuk bergabung, salah satunya ialah Hafez Al Assad dikarenakan partai ini mendukung sekularisme dengan tidak membedakan agama.

Jika ditinjau dari teori-teori mengenai konflik, terutama berdasar teori identitas, gejolak yang terjadi di Suriah disebabkan karena identitas rakyat Suriah tengah terancam akibat hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak terselesaikan.³⁰ Sejak Hafez Al Assad menjadi salah satu orang terkuat di Suriah dan berhasil ditempatkan sebagai Presiden Suriah, ia berubah menjadi seorang pemimpin yang diktator. Ia juga termasuk kelompok minoritas yang bergolongan Syiah Allawiyah, sedangkan sebagian besar warga Suriah adalah golongan Sunni.

Faktor identitas inilah yang menjadi alasan Suriah sering mengalami gejolak. Terbukti bahwa Hafez Al Assad bersikap represif terhadap kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan pemerintahannya, seperti kelompok Ikhwanul Muslimin. Pada tahun 1982, Ikhwanul Muslimin dan kelompok lainnya melakukan pemberontakan di Hama.³¹ Ikhwanul Muslimin merupakan salah satu kelompok yang telah menentang Hafez Al Assad karena ia termasuk golongan Allawiyah. Tahun 1979, Ikhwanul Muslimin mulai melakukan segala bentuk pemberontakan dengan mengepung Kota Hama selama 2 bulan, akan tetapi Hafez Al Assad dapat mengatasi gejolak tersebut

dengan manuvernya dan dukungan warga sipil sehingga mampu mempertahankan kekuasaannya.³²

Alasan warga sipil memberikan dukungan dikarenakan Hafez Al Assad telah menempatkan warga sipil dari golongan mayoritas dan minoritas di berbagai sektor. Hafez Al Assad menggunakan strategi dengan memberikan peranan penting di sektor politik dan ekonomi kepada warga Muslim terutama dari golongan Sunni demi mempertahankan relasi dan legitimasinya. Hafez Al Assad menempatkan mereka di parlemen dan mendapatkan jatah di kursi pemerintahan terutama sebagai anggota kabinet. Sedangkan dalam bidang ekonomi Hafez Al Assad memberikan ruang gerak yang luas bagi Partai Ba'ath yang anggotanya merupakan mayoritas dari warga Muslim untuk melakukan bisnis dan pemerintah tetap sebagai pengontrol. Hafez Al Assad juga menempatkan warga minoritas yang termasuk Druze, Kristen, dan Allawiyah dengan menempatkan mereka di sektor keamanan sebagai angkatan bersenjata, badan intelijen, dan kepolisian.³³

Saat ini, keadaan Suriah berbeda dengan sebelumnya dikarenakan konflik yang terjadi tidak hanya berbenturan dengan identitas, melainkan juga faktor kepentingan. Aktor yang terlibat tidak hanya antara pemerintah dan warga sipil, namun juga melibatkan negara lain. Munculnya *Arab Spring* di Suriah menjadikan terbentuknya berbagai kelompok militan. Keadaan tersebut diperkeruh oleh pihak-pihak asing yang membantu kelompok tersebut dengan memberikan bantuan berupa sumbangan senjata atau dana. Keadaan ini yang menciptakan kelompok tersebut menjadi semakin kuat yang selanjutnya mempengaruhi kemunculan ISIS di Suriah. Untuk melihat kondisi negara Suriah sebelum kemunculan ISIS, penulis akan meninjau dari tiga aspek, yakni aspek politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya dengan rentang waktu antara tahun 2004 hingga 2013.

Situasi dan Kondisi Negara Suriah Sebelum Kemunculan ISIS (Aspek Politik-Keamanan, Ekonomi, dan Sosial-Budaya)

Dalam bidang politik-keamanan, setelah wafatnya Hafez Al Assad pada tahun 2000, kepemimpinannya digantikan oleh putranya, Bashar Al Assad. Ia juga seorang pemimpin yang diktator. Ia menjadi presiden pada tanggal 17 Juli 2000 dengan masa bakti tujuh tahun dan terpilih kembali sebagai presiden untuk kedua kalinya pada tanggal 17 Juli 2007 berkat keteguhan sikapnya yang berpaham nasionalisme-progresif serta anti imperialisme dan zionisme.³⁴ Di masa kepemimpinannya, Suriah tetap memosisikan diri sama halnya dengan pemerintahan Hafez Al Assad. Suriah melakukan kebijakan luar negeri untuk merebut kembali wilayah Arab yang diduduki Israel termasuk Dataran Tinggi Golan yang sesuai perbatasan 4 Juni 1967, Resolusi DK PBB No. 242 dan

383 dan prinsip *land for peace* hasil dari Konferensi Internasional mengenai Palestina di Madrid tanggal 17-18 Juli 2001.³⁵ Perebutan ini telah terjadi saat pemerintahan Hafez Al Assad, akan tetapi belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Perebutan pada tahun 1967 telah menciptakan peperangan antara kedua belah pihak, perang tersebut dinamakan Perang Enam Hari.³⁶ Wilayah ini memiliki nilai strategis bagi kedua negara dikarenakan secara geografis wilayah tersebut terdapat kawah gunung yang memiliki mata air bawah tanah yang bernama Birkat Ram.³⁷ Selain itu, Dataran Tinggi Golan juga dilintasi sejumlah air terjun dan sungai-sungai musiman baik saat musim dingin maupun kemarau sehingga wilayah ini menjadi penyuplai sumber air bagi Suriah maupun Israel. Ditambah lagi, wilayah ini juga memiliki tanah yang subur dikarenakan mengandung material vulkanik dan unsur hara tinggi sehingga cocok untuk dijadikan pertanian dan peternakan. Dapat dikatakan bahwa wilayah tersebut memiliki esensi yang tinggi baik untuk sumber kepentingan di bidang ekonomi, politik, maupun militer bagi Suriah dan Israel. Dalam peperangan, Suriah mengalami kekalahan dan dilakukan berbagai negosiasi antara kedua belah pihak. Akhirnya, wilayah Dataran Tinggi Golan menjadi kekuasaan Israel. Meskipun demikian, Suriah tetap melakukan berbagai cara untuk merebut kembali wilayah tersebut.

Faktanya, saat ini kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Bashar Al Assad telah menunjukkan bahwa Suriah sangat menentang Israel, selain itu kebijakannya berseberangan dengan Amerika Serikat.³⁸ Posisi inilah yang menjadi bumerang bagi Suriah dengan menjadi musuh besar Amerika Serikat dan Israel. Bashar Al Assad dengan tegas menentang unilateralisme Amerika Serikat dalam invasinya bersama pasukan koalisinya ke Irak. Tindakan yang dilakukan Bashar Al Assad membuat Presiden George W. Bush melalui *Great Middle East Democratic Plan* menjatuhkan sanksi ekonomi dengan *Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act*.³⁹

Ternyata sanksi yang diberikan Amerika Serikat tidak berpengaruh besar terhadap keadaan Suriah. Suriah tetap menjadi negara yang stabil dan aman serta dinamis dengan kemajuan di berbagai bidang, termasuk pembangunan nasional. Terkait mengenai perang antara Lebanon dan Israel pada tanggal 12 Juli 2006 selama 34 hari, Suriah turut andil untuk membela Lebanon dengan mengimbangi kekuatan Israel.⁴⁰ Keberpihakan Suriah dilakukan untuk mendukung gerilyawan Hizbullah di Lebanon baik secara finansial maupun politik. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan Suriah karena wilayah Lebanon berbatasan langsung dengan Suriah. Terlebih lagi Suriah memiliki peran dalam konflik di Palestina dengan dibukanya kantor perwakilan Hamas dan PLO di Damaskus. Saat berada di bawah kepemimpinan Bashar Al Assad, Suriah merupakan negara yang anti-Israel

dan Amerika Serikat. Suriah selalu aktif dalam berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam negerinya.

Jika ditinjau dari aspek ekonomi, Suriah mengalami kemajuan yang pesat di bawah pemerintahan Bashar Al Assad. Suriah melakukan sistem ekonomi yang proteksionis dan mulai memasuki masa transisi dan transformasi dari sistem ekonomi sentralistik ke arah ekonomi pasar terbuka. Akan tetapi, pemerintah Suriah tidak menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dengan tetap mengontrol jalannya perekonomian. Setelah mendapatkan sanksi ekonomi melalui Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act, Bashar Al Assad mengubah seluruh transaksi dalam dan luar negeri dari mata uang dolar AS menjadi Euro pada pertengahan Februari 2006.⁴¹ Kebijakan yang dilakukan Bashar Al Assad membuat Amerika Serikat semakin sentimen. Selanjutnya Bashar Al Assad menerapkan kebijakan dan deregulasi di bidang investasi, keuangan, dan perbankan, perdagangan, dan fleksibilitas usaha swasta.⁴² Selain itu, dengan kebijakan pemerintah Suriah dalam mengontrol perekonomiannya membuat investor lokal memiliki peran yang signifikan yang mencapai 70% sedangkan investasi negara-negara Arab mencapai 24% dan investor dari negara non-Arab mencapai 6%. Dampak dari kebijakan tersebut membuat nilai investasi meningkat mencapai 7 miliar dolar AS (2005).⁴³ Kebijakan ekonomi yang telah dicanangkan membuat negara ini tidak bergantung terhadap investor asing. Dengan demikian, sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat tidak menjadikan perekonomian negara ini menurun, melainkan meningkat.

Selain itu, Suriah memiliki sumber daya alam berupa minyak yang telah memengaruhi devisa negaranya. Hal ini terbukti dengan tingginya pendapatan Suriah dari hasil minyak tersebut. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Suriah naik sebesar 5 persen dan tahun 2007 naik sebesar 5,2 persen dengan pendapatan per kapita 1.570 dolar AS (sekitar 14,4 juta rupiah) per tahun.⁴⁴ Pemerintah Suriah telah menjalin berbagai kerjasama perdagangan baik di kawasan Timur Tengah, Uni Eropa, Rusia, dan negara-negara Asia. Produk ekspor Suriah meliputi sektor pertanian, minyak mentah, kapas, fosfat, dan tekstil. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa keadaan perekonomian Suriah mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan saat berada di bawah rezim Bashar Al Assad.

Sedangkan dalam aspek sosial budaya, berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Bashar Al Assad telah membuat rakyat semakin mendukung kepemimpinannya. Bashar Al Assad dinyatakan cukup mampu untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi, jika ditinjau berdasarkan teori

identitas, terdapat sebagian rakyat Suriah yang tidak mendukung kepemimpinan Bashar Al Assad karena ia merupakan golongan Syiah. Selama kepemimpinan Bashar Al Assad terdapat berbagai konflik internal dengan kelompok-kelompok yang berusaha menggulingkan pemerintahannya.

Kelompok yang kontra terhadap kepemimpinannya yang disebut sebagai pemberontak. Mereka ingin melakukan revolusi di negaranya. Gejolak yang terjadi telah membuat negara ini semakin tidak stabil. Terlebih Bashar Al Assad secara represif melakukan penyerangan dengan pasukan militernya untuk meredam aksi yang dilakukan para pemberontak. Aksi militer yang dilakukan tidak membuat para pemberontak menghentikan aksinya melainkan semakin membuat kekacauan di Suriah. Hal ini menjadikan sebagian rakyat kecewa akan tindakan yang dilakukan Bashar Al Assad.

Di sisi lain, gejolak juga terjadi akibat kegagalan pemerintah Suriah dalam menanggulangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Walaupun Bashar Al Assad mampu menyejahterakan rakyatnya, akan tetapi kesejahteraan tersebut tidak merata di wilayah Suriah. Masih banyak ketimpangan yang terjadi, terlebih dengan kepemimpinan Bashar Al Assad yang bersifat represif terhadap rakyat yang menentang pemerintahannya. Selain itu, meskipun perekonomian Suriah mengalami peningkatan, akan tetapi menurut sejumlah peneliti, sekitar 5 juta rakyat Suriah hidup di bawah garis kemiskinan.⁴⁵ Tampaknya semua kenyataan tersebut semakin membuat kondisi negara ini menjadi tidak stabil.

Gejolak *Arab Spring* dan Intervensi Asing di Suriah

Pada hakikatnya *Arab Spring* yang terjadi di Suriah tidak hanya merupakan benturan ideologi saja melainkan juga terdapat kepentingan yang melibatkan berbagai macam aktor baik state maupun non-state. Berbagai macam konflik terjadi karena rezim pemerintahan Assad kerap menggunakan kekuasaan secara otoriter untuk menindas rakyat yang menentangnya sehingga lambat laun pemerintahan Assad kehilangan legitimasi politiknya. Implikasi dari penggunaan kekuasaan yang cenderung menindas mengarah pada suatu kondisi dimana masyarakat mulai merasa tidak senang atas tindakan represif tersebut yang akhirnya menimbulkan pergerakan pada level masyarakat yang menuntut Bashar Al Assad agar turun dari tampuk kekuasaan. Pergerakan dan perlawanan masyarakat yang menuntut Bashar Al Assad turun dari kekuasaannya akhirnya semakin meluas. Di sisi lain pergerakan rakyat ini mencapai momentumnya bersamaan dengan adanya *Arab Spring*. Dari gejolak yang terjadi di beberapa negara dalam arus *Arab Spring*, gejolak di negara Suriah merupakan gejolak yang sulit untuk diselesaikan karena banyaknya kepentingan dari berbagai pihak baik pihak internal maupun eksternal. Aktor

yang berasal dari pihak internal antara lain rezim penguasa Bashar Al Assad, dewan koalisi nasional Suriah, dan kelompok militan Suriah. Sedangkan dari pihak eksternal antara lain Amerika Serikat, Israel, Rusia, Cina, dan Iran. Pergolakan yang terjadi sejak awal Maret 2011 telah menelan banyak korban terutama warga sipil Suriah.⁴⁶ Jatuhnya banyak korban semakin membuat reputasi Bashar Al Assad menurun di kalangan para pemimpin dunia. Tuntutan agar Bashar Al Assad turun dari tampuk kekuasaan merupakan suatu harapan untuk membentuk negara demokrasi. Untuk mengantisipasi terjadinya pergolakan yang lebih besar dari para demonstran, Bashar Al Assad menawarkan sebuah reformasi politik.⁴⁷ Akan tetapi, dengan keadaan rakyat Suriah yang semakin memberontak membuat kebijakan yang dilakukan Bashar Al Assad tidak menghasilkan perdamaian di Suriah.

Konspirasi asing telah membuat keadaan Suriah menjadi tidak stabil. Terdapat berbagai kepentingan nasional baik bagi Amerika Serikat, Cina, Rusia, Israel, Iran, maupun negara-negara sekutu lainnya. Terbukti bahwa Cina dan Rusia melakukan hak veto pada resolusi PBB dalam kasus konflik di Suriah sehingga menimbulkan kecaman dari Amerika Serikat, Israel, dan negara sekutu lainnya. Sedangkan Iran memberikan dukungannya dengan memasok senjata dan teknologi militer serta mengirim pelatih militer ke Suriah. Selain itu, Iran mengirim penasehat politik dan membantu pemerintah Suriah dengan informasi dinas rahasia.⁴⁸ Berbagai intervensi asing dalam konflik Suriah tidak terlepas dari kepentingan masing-masing pihak. Di sisi lain, tidak hanya kepentingan-kepentingan asing yang memperkeruh suasana di Suriah melainkan juga dengan mulai munculnya kelompok militan asing yang berlandaskan ideologi Islam radikal (kelompok jihadis). Kelompok militan ini tidak berjuang untuk membangun negara yang demokratis di Suriah melainkan sebuah “negara Islam”. Maka dapat disimpulkan bahwa konflik di Suriah tidak hanya membuka peluang bagi pihak asing yang berkepentingan, melainkan juga kelompok-kelompok militan lainnya sehingga konflik di Suriah lebih mengarah kepada suatu kondisi “perang sipil”.

Perang Sipil di Suriah

Konflik yang terjadi di Suriah yang dilatarbelakangi oleh upaya menurunkan Bashar Al Assad dari tampuk kekuasaan telah menjadi sebuah aksi pemberontakan nasional karena ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Bashar Al Assad dan keinginan rakyat untuk melakukan revolusi. Aksi pemberontakan nasional telah menciptakan konflik internal di Suriah dimana aksi pemberontakan telah membentuk kelompok yang pro dan kontra terhadap rezim Bashar Al Assad. Kelompok yang kontra terhadap pemerintah Bashar Al Assad mulai mengangkat senjata dan melakukan

perlawanan bersenjata. Celakanya, mereka tidak hanya menysasar kelompok-kelompok pro pemerintah, namun tak jarang juga memakan korban warga sipil yang tidak bersalah. Konflik internal telah menjelma menjadi perang sipil antara masyarakat Suriah.

Konflik di Suriah dapat dinamakan sebagai konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional.⁴⁹ Dinamakan konflik bersenjata internasional dikarenakan konflik ini terjadi antar negara dimana terjadi banyak intervensi oleh negara lain terkait konflik tersebut. Dinamakan konflik bersenjata non-internasional dikarenakan konflik yang terjadi adalah antara kelompok bersenjata kontra pemerintah dengan angkatan bersenjata pemerintah.⁵⁰ Kelompok kontra pemerintah membentuk suatu organisasi bernama Tentara Pembebasan Suriah (*Free Syrian Army*). Tentara Pembebasan Suriah merupakan suatu pemberontak yang memiliki struktur organisasi serta komando, menguasai wilayah secara efektif, dan melakukan operasi militer secara teratur dan bersama dimana pemberontak tersebut terbentuk dari kelompok oposisi yang membelot, milisi-milisi, dan korps sukarelawan. Kelompok ini juga dinamakan sebagai kombatan. Tentara Pembebasan Suriah tidak hanya menyerang pemerintah Suriah melainkan juga terhadap warga sipil ataupun kelompok yang pro terhadap pemerintahan Bashar Al Assad.

Konflik yang terjadi di Suriah tidak hanya sebagai konflik antara pemerintah dengan rakyat melainkan rakyat dengan rakyat. Selain Tentara Pembebasan Suriah, terdapat kelompok-kelompok militan lainnya yang tidak menyetujui pemerintahan Suriah. Mereka juga turut aktif dalam melakukan pemberontakan. Kelompok pemberontak tidak segan membunuh saudaranya sendiri. Mereka telah membunuh 190 warga sipil dan menculik 200 sandera dalam sebuah serangan militer.⁵¹ Kelompok pemberontak membunuh seluruh keluarga yang berada di rumah dan mengeksekusi penduduk. Mereka mengeksekusi warga sipil dari desa-desa yang dihuni pengikut sekte Allawiyah dimana sekte tersebut merupakan para pendukung Bashar Al Assad.⁵² Tindakan tersebut tidak dapat dikatakan lagi sebagai perjuangan untuk menegakkan keadilan rakyat terhadap pemerintah Bashar Al Assad yang otoriter, melainkan sebuah bentuk pelanggaran terhadap HAM.

Pemerintah Suriah juga melakukan serangan yang sengit kepada para pemberontak. Pertumpahan darah kian meningkat dengan tewasnya para pejuang pembebasan Suriah dan warga sipil. Meski demikian, pejuang pembebasan juga berhasil melakukan perlawanan dan menewaskan tentara Bashar Al Assad.⁵³ Terbukti bahwa konflik yang terjadi telah menciptakan perang saudara di Suriah. Ribuan orang tewas akibat konflik bersenjata baik dari pihak oposisi maupun pendukung rezim Bashar Al Assad.

Keadaan Suriah nampak semakin memburuk karena banyaknya kelompok militan yang turut melakukan pemberontakan demi menggulingkan rezim Bashar Al Assad. Konflik di Suriah telah memberi peluang bagi kelompok militan asing untuk membuat suatu organisasi dalam upaya melawan Bashar Al Assad. Kombatan asing tersebut dikenal sebagai kelompok mujahidin Jabhat An Nushrah di Suriah. Jabhat An Nushrah dikenal sebagai kelompok jihad yang paling keras dengan tujuan menggulingkan rezim Bashar Al Assad dan menggantikannya dengan sebuah negara Islam di bawah naungan hukum Syariah. Mereka menolak untuk mendirikan negara demokrasi, menolak untuk berkompromi dengan Bashar Al Assad, dan menginginkan tegaknya syariah dan khilafah. Gejolak yang terjadi di Suriah bukan hanya sekedar memperjuangkan negara demokrasi melainkan juga memperjuangkan negara Islam berdasarkan hukum syariah. Dapat dikatakan bahwa kelompok militan Jabhat An Nusrah atau yang dikenal sebagai Front Nusra merupakan salah satu fraksi yang memberontak pemerintah Bashar Al Assad di Suriah. Kelompok tersebut dibentuk sejak 23 Januari 2012 dan telah diakui sebagai afiliasi al Qaeda.⁵⁴

Walaupun banyak pernyataan bahwa Front Nusra telah keluar dari aliansi Al Qaeda akan tetapi PBB telah menetapkan kelompok tersebut masuk dalam daftar organisasi teroris. Kelompok tersebut melakukan berbagai penyerangan dengan melakukan pemboman bunuh diri maupun pemboman mobil di berbagai daerah perkotaan yang menargetkan militer Bashar Al Assad. Penyerangan Front Nusra yang berafiliasi dengan Al Qaeda ini tercatat dimulai semenjak tahun 2011 dengan pemboman di Damaskus dan Aleppo yang menewaskan banyak korban.⁵⁵ Kelompok militan ini tidak hanya beranggotakan warga Suriah saja melainkan juga warga negara lain.⁵⁶ Kelompok ini juga kerap melakukan serangan terhadap Tentara Pembebasan Suriah walaupun diantara keduanya memiliki tujuan yang sama yakni menggulingkan rezim Bashar Al Assad.

Kelompok jihadis Front Nusra sering disebut sebagai Laskar Al Qaeda di Irak dan Suriah (*Tandzim Al-Qo'idah fil Iraq wa Syaam*). Alasan utama terbentuknya kelompok tersebut di Suriah adalah untuk memerangi pasukan pemerintahan di Suriah dan kemudian membentuk sebuah negara Islam. Kelompok tersebut merupakan salah satu aktor kepentingan yang memperkeruh gejolak di Suriah. Aktor ini merupakan kombatan asing yang turut bertempur di Suriah. Mereka membawa nama Islam dan cenderung radikal dalam menyebarkan pahamnya. Kondisi ini lantas menimbulkan keresahan bagi Bashar Al Assad dan negara lainnya. Amerika Serikat pun menyatakan bahwa kelompok tersebut memiliki agenda tersendiri dalam pertempuran melawan Bashar Al Assad. Front Nusra dan Al Qaeda saling

bekerjasama melakukan serangan untuk mengontrol daerah kekuasaan di Suriah.

Selanjutnya, mulailah terbentuk kekuatan negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) yang dideklarasikan pada bulan April 2013.⁵⁷ Dapat dikatakan bahwa kelompok ISIS ini tumbuh akibat dari gejolak perang Irak dan perang sipil di Suriah.⁵⁸ Terbentuknya berbagai kelompok militan di Suriah telah memberikan suatu kesempatan bagi kelompok-kelompok tersebut untuk melakukan kerjasama demi mencapai tujuan bersama. Banyak anggota Front Nusra di Suriah yang akhirnya bergabung dengan ISIS untuk memperjuangkan didirikannya negara Islam. Mereka saling bekerjasama untuk melakukan perlawanan baik terhadap rezim Bashar Al Assad, Amerika Serikat, maupun negara sekutu lainnya.

Di sisi lain, kelompok oposisi moderat (Tentara Pembebasan Suriah/FSA) mendukung upaya yang dilakukan negara Amerika Serikat untuk menghancurkan ISIS dan menggulingkan Presiden Bashar Al Assad. Kelompok-kelompok yang kontra terhadap Presiden Bashar Al Assad membutuhkan dukungan dunia internasional untuk melawan kediktatoran rezim Al Assad sekaligus melawan terorisme ISIS. Segala campur tangan yang dilakukan oleh para aktor internasional tidaklah membuat Suriah menjadi damai, namun keadaan semakin rumit dengan tumbuhnya kelompok pemberontak baru bernama negara Islam di Irak dan Suriah atau Islamic State Iraq and Syria (ISIS). Keberadaan ISIS menjadikan suasana Suriah bertambah keruh dan membuat warga sipil semakin banyak menjadi korban. Upaya pemerintah Suriah dan negara lain untuk menyerang kelompok ISIS ternyata tidak serta merta membuat kelompok ini lemah. Kelompok ini justru bertambah kuat karena banyaknya perekrutan anggota dari berbagai negara.

Kesimpulan

Dari sudut pandang geopolitik, kawasan Timur Tengah merupakan wilayah yang rawan konflik namun juga strategis lantaran terdapat berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah ruah. Saat ini konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah tidak hanya merupakan benturan ideologi, melainkan terdapat kepentingan yang melibatkan berbagai macam aktor baik *state* maupun *non-state*. Jika ditinjau dari teori-teori mengenai konflik, terutama berdasar teori identitas, gejolak yang terjadi di Irak dan Suriah adalah karena terancamnya identitas rakyat akibat hilangnya sesuatu atau adanya penderitaan di masa lalu yang tidak terselesaikan.⁵⁹

Pada masa pemerintahan Saddam Hussein, kelompok Sunni melakukan penindasan terhadap suku lain di Irak, termasuk Syiah. Selain itu, konflik antar etnis dan agama terjadi dimana-mana, seperti konflik antara kelompok Syiah dan Sunni serta Kurdi dimana ketiga kelompok tersebut saling berlomba untuk memperebutkan kursi kekuasaan di Irak. Konflik etnis yang terjadi tidak hanya berdampak pada aspek politik-keamanan saja, melainkan berimbas pada aspek ekonomi dan sosial-budaya seperti dengan meningkatnya pengangguran, kemiskinan, pelanggaran HAM, dan kelaparan. Invasi Amerika Serikat juga telah memperkeruh suasana di Irak. AS berdalih ingin melucuti senjata pemusnah massal yang dimiliki Irak dan menegakkan HAM. Namun pada kenyataannya, AS memiliki maksud yang terselubung (*the hidden agenda*).

Tidak jauh berbeda dengan keadaan yang terjadi di Irak, konflik di Suriah juga terjadi akibat perbedaan identitas antara Sunni dan Syiah. Semenjak Hafez Al Assad dan Bashar Al Assad berkuasa, mulailah banyak terjadi pergolakan politik dikarenakan kedua pemimpin tersebut berasal dari sekte Syiah Allawiyah sedangkan mayoritas rakyat Suriah adalah penganut Sunni. Peran Suriah di kawasan Timur Tengah juga menjadikan negara ini sering terlibat dalam beberapa konflik, seperti perang Palestina-Israel maupun Israel-Lebanon. Terlebih dengan kebijakan pemerintah Suriah yang anti-Barat membuat negara ini menjadi bumerang bagi negara-negara Barat terutama Amerika Serikat dan Israel. Dengan terjadinya *Arab Spring* di Suriah, konflik yang terjadi tidak lagi hanya antara pemerintah dan rakyat, namun juga melibatkan pihak-pihak asing. Selain itu, *Arab Spring* telah dijadikan peluang bagi kelompok-kelompok militan untuk melakukan pemberontakan demi melawan Bashar Al Assad. Keadaan Suriah semakin diperkeruh tatkala kelompok-kelompok militan saling bekerjasama dan menyatukan kekuatan untuk mendirikan sebuah negara Islam di bawah panji negara Islam Irak dan Suriah atau dikenal dengan sebutan ISIS. Kelompok ini benar-benar telah menghancurkan negara Irak dan Suriah serta secara aktif terus berusaha menguasai wilayah-wilayah di kedua negara tersebut.

Catatan Akhir

¹ Arif, "Politik dan Pemerintahan Timur Tengah dan Afrika."

² "JK Sebut Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim Sering Konflik."

³ "Israel dan 10 Negara Arab Dukung Amerika Perangi ISIS."

⁴ "ISIS Hancurkan Peninggalan Sejarah Irak Berusia 2.500 Tahun."

⁵ "Menghapus Sejarah."

- ⁶ “Puluhan Ribu Warga Sunni Protes PM Irak.”
- ⁷ “Irak Bentuk Pemerintahan Baru.”
- ⁸ *Ibid.*
- ⁹ “In Iraq, A Bushel of Problems Threaten Stability.”
- ¹⁰ “ISIS Subur di Irak karena Faktor Ekonomi.”
- ¹¹ *Ibid.*
- ¹² “Iraq in Danger of Starvation, Says UN.”
- ¹³ “Blair: Ekonomi Irak Melesat Pasca-Saddam.”
- ¹⁴ *Ibid.*
- ¹⁵ “Starvation: the West’s Weapon of Mass Destruction Against Iraq.”
- ¹⁶ “Children ‘Starving’ in New Iraq.”
- ¹⁷ “Swedia Deportasi Pengungsi Kristen Irak.”
- ¹⁸ “Seven Years in Iraq: An Iraq War Timeline.”
- ¹⁹ “CIA Salah Analisis Sebelum Serang Irak.”
- ²⁰ *Ibid.*
- ²¹ “Sunni dan Syiah Berseteru Setelah Ditinggal Amerika.”
- ²² Geovanie, *The Pluralism Project-Potret Pemilu, Demokrasi, dan Islam di Amerika*, 4.
- ²³ “10 Negara yang Memiliki Kekuatan Nuklir.”
- ²⁴ “Daftar Negara Penghasil Minyak Terbesar di Dunia.”
- ²⁵ *Ibid.*
- ²⁶ “Amerika Secara Resmi Akhiri Perang Irak.”
- ²⁷ Widyarsa, “Rezim Militer dan Otoriter,” 278.
- ²⁸ *Ibid.*
- ²⁹ *Ibid.*
- ³⁰ Winarni, “Manajemen dan Resolusi Konflik Internasional.”
- ³¹ Widyarsa, *loc. cit.*
- ³² *Ibid.*
- ³³ *Ibid.*
- ³⁴ “Kebijakan Luar Negeri dan Perkembangan Perekonomian Suriah.”
- ³⁵ *Ibid.*
- ³⁶ “Motivasi Suriah Merebut Kembali Dataran Tinggi Golan dari Israel.”
- ³⁷ *Ibid.*
- ³⁸ Kebijakan, *loc. cit.*
- ³⁹ *Ibid.*
- ⁴⁰ *Ibid.*

- ⁴¹ “Benang Merah Krisis Suriah.”
- ⁴² *Ibid.*
- ⁴³ *Ibid.*
- ⁴⁴ “Konflik Suriah dan Skenario Imperialisme Barat.”
- ⁴⁵ “PBB: Angka Kemiskinan Meningkat di Suriah.”
- ⁴⁶ Mutaholib, “Kepentingan Cina dalam Konflik Suriah.”
- ⁴⁷ Suwarno, “Dampak Strategi Suriah Menghadapi Israel,” 66.
- ⁴⁸ *Ibid.*
- ⁴⁹ Permanasari, Pengantar Hukum Humaniter, 133.
- ⁵⁰ *Ibid.*
- ⁵¹ “Human Rights Watch Pemberontak Suriah Bunuh 190 Warga Sipil.”
- ⁵² “Pemberontak Suriah Eksekusi 67 Warga Sipil.”
- ⁵³ “Dua Belas Pasukan Assad Dieksekusi Pasukan Pembebasan Suriah.”
- ⁵⁴ “Jabhat An Nusra, Panji Perang Ridwan di Suriah.”
- ⁵⁵ *Ibid.*
- ⁵⁶ *Ibid.*
- ⁵⁷ “Bagaimana Kelompok Jihadis Terbentuk.”
- ⁵⁸ “ISIS Punya Pasukan 80.000 di Suriah dan Irak.”
- ⁵⁹ Winarni, *loc. cit.*

Daftar Referensi

- Antara News. “Puluhan Ribu Warga Sunni Protes PM Irak.” Dilihat 07 April 2015. <http://m.antaranews.com/berita/350361/puluhan-ribu-warga-sunni-protes-pm-irak>.
- Arif, Muhammad Qobidl ‘Ainul. “Politik dan Pemerintahan Timur Tengah dan Afrika: Pengantar Studi Timur Tengah.” Perkuliahan, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Sebelas Maret Surakarta, 17 Februari 2015.
- Artileri. “10 Negara yang Memiliki Kekuatan Nuklir.” Dilihat 08 April 2015. <http://www.artileri.org/2014/11/10/-negara-yang-memiliki-kekuatan-nuklir.html?m=1>.
- BBC. “Bagaimana Kelompok Jihadis Terbentuk.” Dilihat 09 April 2015. http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/07/140725_profil_isis.html.

- BBC. "Children 'Starving' in New Iraq." Dilihat 07 April 2015.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4395525.stm.
- Berdikari Online. "Konflik Suriah dan Skenario Imperialis Barat." Dilihat 07 April 2015. <http://www.berdikarionline.com/dunia-bergerak/20130713/konflik-suriah-dan-intervensi-imperialis-barat.html>.
- CNN. "In Iraq, A Bushel of Problems Threaten Stability." Dilihat 07 April 2015. <http://edition.cnn.com/2013/11/01/world/meast/iraq-five-danger-signs/>.
- CNN Indonesia. "Jabhat An Nusra, Panji Perang Ridwan di Suriah." Modifikasi terakhir 09 April 2015.
<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150327104638-120-42303/jabhat-al-nusra-panji-perang-ridwan-di-suriah/>.
- Daulah Islam. "Dua Belas Pasukan Assad Dieksekusi Pasukan Pembebasan Suriah." Modifikasi terakhir 07 April 2015.
<http://daulahislam.com/news/suriah-news/qishas-dua-belas-pasukan-assad-dieksekusi-pasukan-pembebasan-suriah.html>.
- Detik. "Human Rights Watch Pemberontak Suriah Bunuh 190 Warga Sipil." Modifikasi terakhir 07 April 2015.
<http://news.detik.com/read/2013/10/11/140015/2384638/934/human-rights-watch-pemberontak-suriah-bunuh-190-warga-sipil.html>.
- Geovanie, Jeffrie. *The Pluralism Project-Potret Pemilu, Demokrasi, dan Islam di Amerika*. Jakarta: Penerbit Exposé, 2013.
- Independent. "Starvation: the West's Weapon of Mass Destruction Against Iraq." Dilihat 07 April 2015.
<http://www.independent.co.uk/news/starvation-the-wests-weapon-of-mass-destruction-against-iraq-1073855.html>.
- Inilah. "ISIS Punya Pasukan 80.000 di Suriah dan Irak." Modifikasi terakhir 09 April 2015. <http://m.inilah.com/news/detail/2131245/isis-punya-pasukan-80000-di-suriah-dan-irak.html>.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Kebijakan Luar Negeri dan Perkembangan Perekonomian Suriah." Dilihat 06 April 2015.
http://kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemID=e7162b0e-04cb-48de-bb1f-cec93f34ab36.
- Kiblat. "PBB: Angka Kemiskinan Meningkat di Suriah." Modifikasi terakhir 08 April 2015. <http://www.kiblat.net/2013/04/08/pbb-angka-kemiskinan-meningkat-di-suriah.html>.

- Kompas. "ISIS Hancurkan Peninggalan Sejarah Irak Berusia 2.500 Tahun." Dilihat 30 Maret 2015.
<http://internasional.kompas.com/read/2015/02/26/22230151/ISIS.Hancurkan.Peninggalan.Sejarah.Irak.Berusia.2500.Tahun>.
- Mutaholib, Abdul. "Kepentingan Cina dalam Konflik Suriah." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013.
- Okezone. "Daftar Negara Penghasil Minyak Terbesar di Dunia." Dilihat 07 April 2015.
<http://m.okezone.com/read/2015/02/03/213/1100856/daftar-negara-penghasil-minyak-terbesar-di-dunia>.
- Okezone. "JK Sebut Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim Sering Konflik." Dilihat 07 April 2015.
<http://m.okezone.com/read/2015/04/06/340/1129640/jk-sebut-negara-berpenduduk-mayoritas-muslim-sering-konflik>.
- Permanasari, Arlina. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: International Committee of the Red Cross, 1991.
- Republika. "Blair: Ekonomi Irak Melesat Pasca-Saddam." Dilihat 07 April 2015. <http://m.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/11/06/md1uau-blair-ekonomi-irak-melesat-pascasaddam>.
- Republika. "CIA Salah Analisis Sebelum Serang Irak." Dilihat 08 April 2015. <http://m.republika.co.id/berita/internasional/global/12/09/07/m9yjhfcia-salah- analisis-sebelum-serang-irak>.
- Republika. "Menghapus Sejarah." Dilihat 30 Maret 2015.
<http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/03/16/nlaroc44-menghapus-sejarah>.
- Sindo News. "Pemberontak Suriah Eksekusi 67 Warga Sipil." Dilihat 07 April 2015.
<http://international.sindonews.com/read/793394/43/pemberontak-suriah-eksekusi-67-warga-sipil.html>.
- Suwarno, Windratmo. "Dampak Strategi Suriah Menghadapi Israel terhadap Pergolakan di Suriah." *Jurnal Global dan Strategis* 1 (2014): 63-78. Dilihat 07 April 2015,
<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jgs1d03a7d97bfull.pdf.html>.
- Tempo. "Amerika Secara Resmi Akhiri Perang Irak." Dilihat 08 April 2015.
<http://m.tempo.co/read/news/2011/12/16/115372102/amerika-secara-resmi-akhiri-perang-irak>.

- Tempo. "ISIS Subur di Irak karena Faktor Ekonomi." Dilihat 07 April 2015. <http://m.tempo.co/read/news/2014/08/18/115600349/ISIS-Subur-di-Irak-karena-Faktor-Ekonomi>.
- Tempo. "Sunni dan Syiah Berseteru Setelah Ditinggal Amerika." Dilihat 08 April 2015. <http://m.tempo.co/read/news/2011/12/17/115372189/Sunni-dan-Syiah-Berseteru-Setelah-Ditinggal-Amerika>.
- The Guardian. "Iraq in Danger of Starvation, Says UN." Dilihat 07 April 2015. <http://www.theguardian.com/world/2003/may/11/iraq2>.
- Time. "Seven Years in Iraq: An Iraq War Timeline." Dilihat 08 April 2015. http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1967340_1967342,00.html.
- Viva News. "Irak Bentuk Pemerintahan Baru." Dilihat 07 April 2015. <http://m.news.viva.co.id/news/read/195156-irak-bentuk-pemerintah-baru>.
- Viva News. "Swedia Deportasi Pengungsi Kristen Irak." Dilihat 08 April 2015. <http://m.news.viva.co.id/news/read/188786-swedia-deportasi-pengungsi-irak-kristen>.
- Voice of Palestine. "Benang Merah Krisis Suriah." Modifikasi terakhir 07 April 2015. <http://voiceofpalestine.net/artikel/opini/939-benang-merah-krisis-suriah.html>.
- VOA Indonesia. "Israel dan 10 Negara Arab Dukung Amerika Perangi ISIS." Dilihat 30 Maret 2015. <http://www.voaindonesia.com/a/israel-dan-10-negara-arab-dukung-as-hancurkan-isis/2448180.html>.
- Widyarsa, Mohammad Riza. "Rezim Militer dan Otoriter di Mesir, Suriah, dan Libya." *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1 (2012): 273-83. Dilihat 06 April 2015, <https://www.google.co.id/jurnal.uai.ac.id.html>.
- Winarni, Leni. "Manajemen dan Resolusi Konflik Internasional: Teori-Teori Mengenai Penyebab Konflik." Perkuliahan, Jurusan Hubungan Internasional Universitas Sebelas Maret Surakarta, 03 Maret 2015.

This page intentionally left blank